

PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT DALAM PENENTUAN PRIORITAS PENGEMBANGAN DESA WISATA

Amelia Choya Tia Rosalia*, Dedy Aji Suseno, Prasetyo Ari Bowo, Yozi Aulia Rahman

Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomika dan Bisnis

Universitas Negeri Semarang

Kampus Sekaran, Gunung Pati, Kota Semarang

*Email: ameliachoya@mail.unnes.ac.id

Abstrak

Pariwisata adalah satu sektor baru yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kesempatan kerja, pendapatan, dan standar hidup suatu negara. Untuk pembangunan desa, seluruh masyarakat harus berpartisipasi secara aktif. Salah satu masalah yang muncul adalah bahwa sebagian besar masyarakat tidak memahami dengan baik cara untuk menentukan skala prioritas. Hal ini mendukung pentingnya menerapkan program pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan kapasitas mereka untuk menentukan prioritas program pengembangan desa wisata. Secara ideal, pengembangan pariwisata berbasis masyarakat menekankan pembangunan pariwisata dari masyarakat, untuk masyarakat, dan melalui masyarakat. Tahapan kegiatan yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut: 1. Inisiasi dan sosialisasi pelaksanaan pengembangan desa wisata berbasis partisipasi masyarakat dalam penentuan prioritas pengembangan desa wisata; 2. Pendampingan melalui praktik penentuan skala prioritas; 3. Pelaksanaan evaluasi pasca kegiatan sosialisasi penentuan skala prioritas. Hasil kegiatan pengabdian ini berupa hasil dari skala prioritas untuk mendukung dan meningkatkan potensi yang dimiliki oleh Desa Candirejo untuk mencapai kesejahteraan bersama masyarakat.

Kata kunci: Desa wisata, pengembangan, skala prioritas.

PENDAHULUAN

Pengembangan desa wisata merupakan bagian dari penyelenggaraan pariwisata dan berkaitan langsung dengan jasa pelayanan (Frasawi, 2018). Diperlukan kerjasama dengan berbagai komponen penyelenggara wisata yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat lokal. Salah satu sektor gaya baru yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat adalah wisata desa. Banyak negara besar mulai memasukkan pariwisata ke desa (Farhan, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa pariwisata adalah komponen penting dalam meningkatkan ekonomi negara dan mengurangi kemiskinan (Manteiro, 2016). Namun, banyak pihak yang meragukan apakah pariwisata dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap kualitas hidup masyarakat (Raharjana, 2012).

Pariwisata adalah sarana yang sangat berguna untuk mendorong pertumbuhan wilayah, pemberdayaan masyarakat, dan bahkan pengentasan kemiskinan (Setijawan, 2018). Kehidupan masyarakat juga tidak dapat dilepaskan dari sektor UMKM (Kustanto & Prabowo, 2022). Sesuai dengan Undang-Undang tentang perencanaan pembangunan desa yang baru dimana diminta untuk menyusun skala prioritas. Undang-undang UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menuju pada efisiensi sehingga diperlukan peran aktif seluruh masyarakat untuk mengembangkan desa. Manajemen memiliki sejarah berkontribusi terhadap peningkatan perekonomian masyarakat.

Pariwisata berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja, pendapatan, taraf hidup, dan pengaktifan sektor produktif lainnya di negara yang memanfaatkan sektor pariwisata (Amir et al., 2020). Fenomena tersebut muncul dari adanya berbagai kemungkinan yang memungkinkan liburan dan aktivitas di luar kehidupan sehari-hari dikembangkan sebagai sumber daya pariwisata. Pengembangan sumber daya pariwisata diharapkan dapat memberikan kontribusi ekonomi langsung dan tidak langsung kepada masyarakat lokal dan meningkatkan kehidupan sosial. Pemberdayaan masyarakat di desa wisata memberi masyarakat lokal peluang yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan memanfaatkan pertumbuhan industri pariwisata, sehingga semakin berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, mendapatkan manfaat dari pengembangan industri pariwisata dan semakin memperkuat masyarakat (Rochman, 2017; Yuniarto, 2019).

Strategi pengembangan desa wisata ada banyak, dapat dilakukan pada berbagai sisi melalui sosialisasi (Budiman et al., 2023). Namun di sisi lain adanya keterbatasan dan efisiensi anggaran sehingga diperlukan penentuan skala prioritas. Skala prioritas yang ditentukan di daerah wisata akan memfokuskan usaha, baik di bidang kuliner wisata, wahana wisata, belanja wisata, dan lain-lain. Hal tersebut juga sesuai dengan Undang-Undang tentang perencanaan pembangunan desa yang baru dimana diminta untuk menyusun skala prioritas. Undang-undang UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Presiden Republik Indonesia, 2014) menuju pada efisiensi sehingga diperlukan peran aktif seluruh masyarakat untuk mengembangkan desa. Belum semua masyarakat memahami dengan baik bagaimana teknik-teknik dalam menentukan skala prioritas, serta belum semua masyarakat berpartisipasi dalam penentuan skala prioritas tersebut. Berdasarkan kondisi dan permasalahan yang dihadapi, maka perlu dilaksanakan program pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan partisipasi dan kapasitas masyarakat dalam penentuan prioritas program pengembangan desa wisata.

Desa wisata Candirejo memiliki banyak aspek yang perlu dikembangkan (Septemuryantoro et al., 2020). Adanya keterbatasan dan efisiensi anggaran sehingga diperlukan penentuan skala prioritas. Belum semua masyarakat memahami dengan baik bagaimana teknik-teknik dalam menentukan skala prioritas. Salah satu tempat wisata adalah Desa Candirejo, yang menampilkan nuansa alami pedesaan. Pertanian adalah sumber utama pendapatan masyarakat. Hanya segelintir orang yang bekerja di sektor pariwisata (Hillary, 2020). Jumlah pengunjung yang masuk ke Desa Candirejo sebagai ekowisata masih rendah. Untuk meningkatkan pendapatan daerah, tempat wisata harus diselenggarakan dan dikembangkan dengan lebih baik. Desa Candirejo memiliki wisata alam yang menarik, dan beberapa orang di sana bekerja sebagai petani tanaman palawija seperti jagung, singkong, kacang-kacangan, dan cabai merah. Desa Candirejo memiliki kondisi alam yang sejuk didukung dengan akses jalan yang memadai. Hal ini mendukung kegiatan wisata lain seperti berkeliling wilayah desa dengan pemandangan yang cantik. Desa Candirejo juga didukung beberapa UMKM yang juga dapat menjadi destinasi wisata belanja seperti keripik tempe, keripik singkong, kerajinan anyaman, dan lain-lain. Tujuan dari program ini adalah untuk memberikan dukungan kepada desa dalam menentukan skala prioritas mereka.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini akan dilaksanakan di desa wisata mitra yaitu Desa Wisata Candirejo, Magelang. Jarak Kota Semarang ke Desa Wisata Candirejo diperkirakan 94 km dengan waktu tempuh kurang lebih 2 jam 30 menit. Adapun posisi secara geografis dapat dilihat dari Gambar 1 peta berikut ini.



Gambar 1. Peta Lokasi Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

Alasan pemilihan lokasi Desa Candirejo adalah karena desa tersebut merupakan desa yang memiliki potensi desa wisata. Selain itu Desa Candirejo memperoleh dukungan berupa Balkondes dari pemerintah terkait. Hal ini menunjukkan bahwa Desa Candirejo sudah memperoleh dukungan penuh dari pemerintah pusat maupun daerah, tinggal bagaimana strategi pengelolaan dalam penentuan skala prioritas agar percepatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa dapat tercapai.

METODE

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian berupa peningkatan kapasitas masyarakat dalam penentuan prioritas pengembangan Desa Candirejo di Kabupaten Magelang, yang dianggap sebagai desa wisata, merupakan contoh perkembangan pariwisata pedesaan di Magelang. Tahapan kegiatan yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Persiapan

Masyarakat mengikuti kegiatan pengabdian untuk memperoleh informasi dan pengetahuan mengenai skala prioritas dalam kegiatan usaha. Beberapa tahap persiapan adalah:

1. Masyarakat dan tim pengabdian melakukan kajian potensi di Desa Candirejo
2. Tim pengabdian membuat perencanaan untuk sosialisasi dalam penentuan skala prioritas usaha
3. Tim pengabdian membuat materi sosialisasi mengenai penentuan skala prioritas usaha

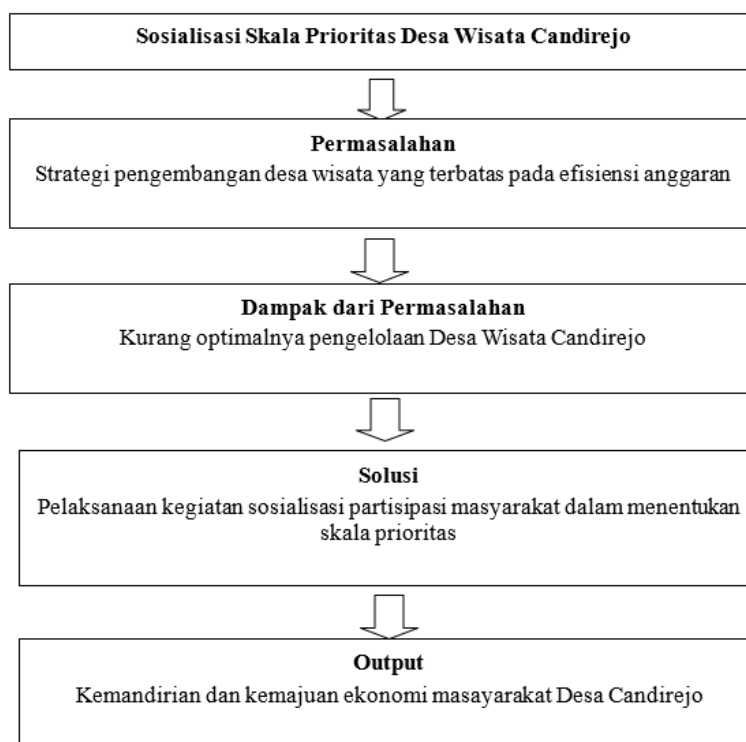
b. Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian dilakukan di Desa Candirejo dengan menggunakan metode sosialisasi kepada pengelola ataupun pemilik usaha. Pemilik usaha yang mengikuti kegiatan ini diantaranya Balkondes Desa Candirejo, UMKM keripik tempe, UMKM keripik olahan ketela, UMKM kerajinan anyaman, serta penyedia jasa wisata desa. Langkah-langkah yang dilaksanakan untuk mencapai hasil yang diharapkan dari kegiatan pengabdian adalah

1. Inisiasi dan sosialisasi pelaksanaan pengembangan desa wisata berbasis partisipasi masyarakat dalam penentuan prioritas pengembangan desa wisata.
2. Pendampingan melalui praktik penentuan skala prioritas.
3. Pelaksanaan evaluasi melalui diskusi dan tanya jawab apakah ada peningkatan setelah adanya sosialisasi kegiatan penentuan skala prioritas.

c. Metode pemberdayaan kelompok sasaran

Pemberdayaan dilakukan melalui kegiatan sosialisasi oleh tim pengabdian. Sosialisasi ini diharapkan mampu mengatasi permasalahan dalam hal strategi pengembangan desa wisata yang dijelaskan pada alur kegiatan pengabdian gambar 4, sebagai berikut:



Gambar 4. Alur Kegiatan Pengabdian

Penilaian indeks keberhasilan program pengabdian masyarakat ini adalah:

- a. Tersampainya sosialisasi penentuan skala prioritas dengan baik.
- b. Keberlanjutan program.

Adanya partisipasi masyarakat dalam penentuan skala prioritas demi kemajuan desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh tim pengabdian dari Program Studi Ekonomika dan Bisnis UNNES kepada pihak desa khususnya pelaku UMKM di Desa Candirejo, Kabupaten Magelang. Pada saat pelaksanaan diawali dengan sambutan dari penanggung jawab desa dan dilanjutkan penyampaian materi dan diskusi tentang penentuan prioritas dalam pengembangan desa wisata. Setelah ceramah dan diskusi para peserta pelaku UMKM menjadi mengetahui bahwa penentuan prioritas dalam sebuah usaha penting adanya dan akan mendukung keberlangsungan UMKM kedepannya.



Gambar 2. Persiapan Kegiatan Pengabdian Masyarakat

Gambar 2 menjelaskan persiapan sebelum dimulainya kegiatan sosialisasi skala prioritas. Tim pengabdian melakukan koordinasi dengan para pelaku UMKM. Kegiatan pengabdian ini meliputi kegiatan partisipasi mitra dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat. Mitra dalam kegiatan ini adalah Desa Candirejo yang bertindak sebagai peserta program. Mitra yang juga didukung oleh tim pengabdian juga turut menyiapkan tempat pelaksanaan program yang diselenggarakan di Balai Ekonomi Desa (Balkondes) Candirejo.



Gambar 3. Pelaksanaan Sosialisasi Penentuan Skala Prioritas

Gambar 3 menjelaskan kegiatan sosialisasi penentuan skala prioritas. Sosialisasi dilakukan melalui metode focus group discussion yang diharapkan memperoleh timbal balik dan menyeluruh dalam hal pemahaman pelaku UMKM.

Berdasarkan sosialisasi dan proses diskusi yang dilakukan oleh tim pengabdian dari Prodi Ekonomi Pembangunan FEB UNNES ditemukan pentingnya penggunaan skala prioritas dalam setiap usaha. Khususnya UMKM yang berada di Desa Candirejo, Kabupaten Magelang. Kegiatan masyarakat desa yang berkaitan dengan kegiatan desa wisata dapat digunakan untuk menentukan upaya pemberdayaan masyarakat (Manteiro, 2016; Menggo et al., 2022). Pemberdayaan melalui sosialisasi yang dilakukan tim pengabdian adalah teknik penetapan skala prioritas melalui teknik ranking dan teknik skoring (Kholil & Khoirunnisa, 2018; Nashir et al., 2020). Teknik ranking yaitu dengan memberi ranking pada pilihan program. Teknik skoring yaitu dengan memberi skor atau nilai pada pilihan program (Tyas & Damayanti, 2018). Pada teknik ranking semakin kecil angka, maka semakin menjadi prioritas. Sebaliknya pada teknik skor, semakin besar skor maka merupakan program yang menjadi prioritas (Ekoprianto et al., 2021; Sari et al., 2021). Teknik penetapan skala prioritas sering terlalu subyektif, oleh sebab itu dalam menetapkan skala perlu mempertimbangkan sejumlah kriteria, seperti:

1. Kemanfaatan pemecahan masalah
2. Lingkup dampak masalah
3. Dukungan sumberdaya yang ada
4. Kebutuhan Pendanaan
5. Kebijakan Pemerintah
6. Kriteria atau aspek aspek tersebut dimungkinkan diperluas sesuai kesepakatan dan pertimbangan peserta penetapan prioritas.

Kegiatan ini diikuti dengan antusiasme penuh dari mayoritas pelaku UMKM di Desa Candirejo. Harapannya dengan adanya kegiatan ini akan merangsang ketertarikan dari kelompok UMKM untuk terlibat dan dapat melaksanakan praktis penentuan skala prioritas. Sumberdaya manusia di Desa Candirejo juga menjadi fokus dalam menentukan pariwisata mana yang lebih utama dikembangkan. Sumber daya manusia desa yaitu pelaku UMKM mampu menentukan prioritas dalam pengembangan usaha. Sehingga usaha bisa lebih maju, inovatif, dan menarik wisatawan. Hal ini akan meningkatkan pendapatan usaha UMKM desa serta menjadi daya tarik pendukung pada desa wisata.

Penentuan skala prioritas di Desa Wisata Candirejo, Kabupaten Magelang diharapkan dapat menjadi pendukung dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha yang ada. Desa Wisata Candirejo memiliki potensi yang besar pada sektor pariwisata, kerajinan, dan makanan. Banyaknya potensi yang dimiliki desa tentu menjadi pertimbangan tersendiri dalam menentukan fokus

pembangunan usaha desa. Oleh karena itu diharapkan dengan adanya penguasaan teknik penentuan skala prioritas masyarakat sekitar dapat menentukan sektor usaha apa yang bisa menjadi prioritas dan memberikan hasil lebih optimal.



Gambar 5. Sosialisasi Kegiatan Pengabdian

Gambar 5 menjelaskan kegiatan sosialisasi dalam hal penentuan skala prioritas. Penentuan skala prioritas bertujuan untuk mengefektif dan mengefisienkan pengelolaan sektor usaha di Desa Candirejo. Melalui kegiatan ini masyarakat diharapkan mampu untuk mengelola prioritas dalam usahanya.

KESIMPULAN

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, pengelola telah mendirikan desa wisata Candirejo. Pariwisata berbasis komunitas menekankan peran masyarakat lokal dalam mengelola dan mengembangkan pariwisata, termasuk menentukan skala prioritas. Secara ideal, pembangunan pariwisata berbasis masyarakat menekankan pada pembangunan pariwisata dari, untuk, dan oleh masyarakat. Semua tahap pembangunan melibatkan keterlibatan tim pengabdian dan partisipasi masyarakat lokal, mulai dari perencanaan, pembangunan, pengelolaan, dan pembangunan hingga pemantauan dan evaluasi. Tujuan akhir dari pembangunan pariwisata adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat lokal melalui peluang penyelesaian masalah melalui sosialisasi kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Amir, A., Sukarno, T. D., & Rahmawati, F. (2020). Identifikasi Potensi dan Status Pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 4(2), 84–98. <https://doi.org/10.29244/jp2wd.2020.4.2.84-98>

- Budiman, E. A., Hutabalian, R., Ingratubun, F., & Koedoeboen, A. (2023). SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT TERKAIT TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN KAMPUNG DI KAMPUNG TOBATI DISTRIK JAYAPURA SELATAN KOTA JAYAPURA. *ABDIMAS UNWAHAS*, 8(1). <https://doi.org/10.31942/abd.v8i1.8585>
- Ekoprianto, A., Rahmanita, M., & Brahmantyo, H. (2021). Strategi Pengembangan Desa Wisata di Wilayah Exit Jalan Tol Serang-Panimbang. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 5(1), 482–492. <https://doi.org/10.22437/jssh.v5i1.14166>
- Farhan, A. (2018). *Analisis Pemberdayaan Masyarakat Desa Wisata Candirejo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang*. 7(2), 11–20.
- Frasawi, E. S. (2018). Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata Ambengan Kecamatan Sukasada. *Jurnal Pendidikan Geografi Undiksha*, 6(3). <https://doi.org/10.23887/jjpg.v6i3.20704>
- Hillary, J. (2020). *Pengembangan Daya Tarik Wisata di Desa Candirejo, Kabupaten Magelang* [Preprint]. Open Science Framework. <https://doi.org/10.31219/osf.io/gx46m>
- Kholil, A. Y., & Khoirunnisa, N. (2018). Strategi Pengembangan Desa Wisata Gubugklakah. *OPTIMA*, 2(1), 27. <https://doi.org/10.33366/opt.v2i1.899>
- Kustanto, A., & Prabowo, M. S. (2022). SOSIALISASI HUKUM MENGENAI TANTANGAN UMKM DALAM PENERAPAN DIGITAL MARKETING DENGAN IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NO 90 TAHUN 2020 DI KELURAHAN PONGANGAN. *ABDIMAS UNWAHAS*, 7(1). <https://doi.org/10.31942/abd.v7i1.6562>
- Manteiro, M. C. B. (2016). Model Pengembangan Desa Wisata Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Strategi Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Rote Ndao Nusa Tenggara Timur. *BISMAN: Jurnal Bisnis Manajemen*, 2(2), 93–101.
- Menggo, S., Rosdiana Su, Y., & Adiputra Taopan, R. (2022). Pelatihan Pembuatan Website Desa Wisata Di Desa Wisata Meler, Kabupaten Manggarai, NTT. *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1), 108–115. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v6i1.7551>
- Nashir, A. K., Hendrayani, Y., & Ma'arif, D. (2020). IPTEKS BAGI MASYARAKAT (IbM) PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN BANK SAMPAH PLASTIK DI LINGKUNGAN YAYASAN AL KAMILAH SERUA DEPOK. *ABDIMAS UNWAHAS*, 5(1). <https://doi.org/10.31942/abd.v5i1.3338>
- Presiden Republik Indonesia. (2014). *Undang-undang UU Nomor 6 Tahun 2014*.
- Raharjana, D. T. (2012). Membangun Pariwisata Bersama Rakyat: Kajian Partisipasi Lokal Dalam Membangun Desa Wisata di Dieng Plateau. *Jurnal Kawistara*, 2(3). <https://doi.org/10.22146/kawistara.3935>
- Rochman, N. (2017). Model Pengembangan Desa Wisata Berbasis Pemberdayaan Masyarakat. *EQUILIBRIA PENDIDIKAN: Jurnal Ilmiah Pendidikan Ekonomi*, 1(1), 59. <https://doi.org/10.26877/ep.v1i1.1831>
- Sari, N. R., Rahayu, P., & Rini, E. F. (2021). Potensi dan Masalah Desa Wisata Batik: Studi Kasus Desa Girilayu, Kabupaten Karanganyar. *Desa-Kota*, 3(1), 77. <https://doi.org/10.20961/desa-kota.v3i1.34437.77-91>
- Septemuryantoro, S. A., Dima, C. C., & Rahayu, E. (2020). *Developing Ecotourism Culture Potentials Through The Empowerment of Resident of Candirejo Tourism Village, Borobudur, Central Java*. 1(1).
- Setijawan, A. (2018). Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan dalam Perspektif Sosial Ekonomi. *Jurnal Planoearth*, 3(1), 7. <https://doi.org/10.31764/jpe.v3i1.213>
- Tyas, N. W., & Damayanti, M. (2018). Potensi Pengembangan Desa Kliwonan sebagai Desa Wisata Batik di Kabupaten Sragen. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 2(1), 74. <https://doi.org/10.29244/jp2wd.2018.2.1.74-89>
- Yuniarto, S. (2019). *Pengembangan Kawasan Wisata Sumber Taman di Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang*.